



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH ACEH  
**UNIT KERJA** : DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AKMIL HUSEN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 625159

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.894.700.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 487.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 402 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 1.006.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 396.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 108.700.000
5. Tanah Seluas 341 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
6. Tanah Seluas 677 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 677.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 870.000.000**

1. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T / SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT CKD/JEEP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT (CKD) / MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 655.000.000**

**D. SURAT BERHARGA**

**Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

**Rp. 175.152.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.594.852.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.594.852.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.